

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, Hal.6.
- A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 24
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja, 2003, hlm. 32.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15- 16.
- Bayu surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.79
- Chaerudin ,SH.,MH. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi . Refika Aditama . Hlm. 17
- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Media Nusantara Creative, 2008, hlm. 103.
- Hadi Susilo. Joko Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan Good Governance Intelegensia Media hlm 18
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 4
- Hazewinkel Suringa (1953). Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem. Hal-1
- Haw, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3 2005, hlm 597.
- Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.85.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.181.

- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 43
- Romli Atmasasmita. (2003). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung. Refika Aditama.
- R.Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia 1983. Hlm 1.
- Subroto A., *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 14.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm., 60.
- Suyatno, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm.17
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta; Pustaka Baru Press
- Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009, hlm. 3.
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh. hal. 216
- Soetardjo Kartohadikusumo , Desa . Balai pustaka 1984 hlm.2
- Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018. hlm. 3.
- Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan II Nusa Media 2019 . hlm 1.
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cet. Ke-1, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal.64
- Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010, hlm.37
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta,, hlm 123-130.
- Van Hamel. (1913). Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante "s-Gravenhage. Page 4.

Internet

Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia, 7 November 2015,
<http://swaramuslim.net/siyasah/more.php> (11.30)

Indonesia Corruption Watch <https://www.antikorupsi.org/id/page/siapa-icw>

Laporan Survey Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan
KPK. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2011, hlm.9.
<http://acch.kes.go.id/survei-persepsi-masyarakat-tentang-korupsi-dan-kpk>.
dikutip hari kamis tanggal 06 Januari 2022

Oktaresa, Betrika diakses melalui [Amerika Serikat, Negara yang \(Tidak\) Adidaya
Melawan Korupsi - Kompasiana.com](http://AmerikaSerikat.NegaraYangTidakAdidayaMelawanKorupsi-Kompasiana.com)

Peradi Tasikmalaya, diambil dari [https://peradi-tasikmalaya.or.id/bantuan-hukum-
dalam-pandangan-teori-keadilan-bermartabat/](https://peradi-tasikmalaya.or.id/bantuan-hukum-dalam-pandangan-teori-keadilan-bermartabat/), 13 Juli 2020, diakses pada 12
Mei 2022, pukul 17.39 WIB.

Jurnal

Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”,
Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17, 2010, hlm. 219

Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, Hlm.27

Yulianah, Yuyun, Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa, Jurnal Justitia,
Vol.1 No. 2, 2015, hlm 126.

Moh. Mahfud MD. (2006). Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum
Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan
Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 003/PUU IV/2006 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 2 UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang perencanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

RPJM Desa Banggle Tahun 2015-2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

UU Pasal 68 Ayat 1

